



SALINAN

KEPALA DESA GEMANTAR
KABUPATEN WONOGIRI

PERATURAN DESA GEMANTAR
KECAMATAN SELOGIRI
NOMOR 03 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA GEMANTAR KECAMATAN SELOGIRI
TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GEMANTAR,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Desa setiap tahunnya wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagai penjabaran dari RPJM Desa;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa berisi prioritas program, kegiatan, dan anggaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Gemantar Kecamatan Selogiri Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 9. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor Tahun tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Nomor);
 10. Peraturan Desa Gemantar Kecamatan Selogiri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gemantar Tahun 2013 – 2019 (Lembaran Desa Tahun Nomor);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEMANTAR
dan
KEPALA DESA GEMANTAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA GEMANTAR KECAMATAN SELOGIRI TAHUN 2017

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Selogiri
3. Desa adalah Desa Gemantar
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
14. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perDesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
16. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
17. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan,

sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.

18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
22. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat,
27. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

Pasal 2

RKP Desa Gemantar Tahun 2017 berisi prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa Gemantar Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri selama kurun waktu 1 (satu) tahun, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Gemantar Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai pedoman dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2017

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Gemantar

Ditetapkan di Desa Gemantar
pada tanggal 1 Desember 2016

KEPALA DESA GEMANTAR,

Cap.ttd.

SUNARNO

Diundangkan di Desa Gemantar
pada tanggal 1 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DESA GEMANTAR,

IBNU PURWANTO

LEMBARAN DESA GEMANTAR KECAMATAN SELOGIRI TAHUN 2016 NOMOR
03

PERATURAN DESA GEMANTAR KECAMATAN SELOGIRI
 NOMOR 03 TAHUN 2016
 TENTANG
 RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA GEMANTAR
 KECAMATAN SELOGIRI
 TAHUN 2017

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA GEMANTAR KECAMATAN SELOGIRI TAHUN 2017

| Bidang / Program Kegiatan | Lokasi | Perkiraan Volume | Penerima Manfaat | Anggaran (Rp.) | | | | | | ket. |
|---------------------------|--------|------------------|--|----------------------|-----------|---------------------------------------|-------------|------------------------------------|--|-------------|
| | | | | Pendapatan Asli Desa | ADD | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah | Dana Desa | Bantuan Keuangan Pusat /Prov./Kab. | Jumlah Total Anggaran (jumlah kolom 5+6+7+8+9) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Misi | | | | | | | | | - | |
| 1 | | | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | | | | | | - | |
| 1 | 1 | | Penghasilan Tetap dan Tunjangan | | | | | | - | |
| 1 | 1 | 1 | Belanja Pegawai | Pemdes | 1 tahun | Pemdes | 103.020.000 | 295.680.000 | | 398.700.000 |
| 1 | 2 | | Operasional Pemerintah Desa | | | | | | - | |
| 1 | 2 | 1 | Belanja Alat Tulis Kantor | Pemdes | 1 tahun | Pemdes | | 5.102.800 | | 5.102.800 |
| 1 | 2 | 2 | Belanja Perangko, Meterai | Pemdes | 135 buah | Pemdes | | 705.000 | | 705.000 |
| 1 | 2 | 3 | Pakaian Dinas Kades dan Aparatur Desa | Pemdes | 12 potong | Pemdes | | 2.400.000 | | 2.400.000 |
| 1 | 2 | 4 | Pakaian Dinas Linmas | Pemdes | 20 potong | Pemdes | | 5.000.000 | | 5.000.000 |
| 1 | 2 | 5 | Belanja Alat Listrik dan Elektronika | Pemdes | 1 tahun | Pemdes | | 731.800 | | 731.800 |
| 1 | 2 | 6 | Alat dan Bahan Kebersihan | Pemdes | 1 tahun | Pemdes | | 566.000 | | 566.000 |
| 1 | 2 | 7 | Perjalanan Dinas Aparatur Pemerintah Desa | Pemdes | 1 tahun | Pemdes | | 2.040.000 | | 2.040.000 |
| 1 | 2 | 8 | Belanja Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran | Pemdes | 2 tabung | Pemdes | | 400.000 | | 400.000 |
| 1 | 2 | 9 | Pajak Tanah Kas Desa | Pemdes | 1 tahun | Pemdes | | 324.850 | | 324.850 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---------------|--------|---------------|--|------------|-------------|------------|-------------|--|
| 2 | 2 | 1 | Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan / Rehab Gedung TK | TK | | TK | | | 10.000.000 | | 10.000.000 | |
| 2 | 3 | | Rehab/ Pemeliharaan Sarana Prasarana Aparatur Desa | | | | | | | | - | |
| 2 | 3 | 1 | Rehab/ Pemeliharaan Sarana Prasarana Aparatur Desa/ Rehab Kantor Desa | Kantor Desa | | Kantor Desa | | 20.631.000 | | | 20.631.000 | |
| 2 | 4 | | Pembangunan Sarana Air Bersih | | | | | | | | - | |
| 2 | 4 | 1 | Pembangunan Sarana Air Bersih | Dukuh | | Dukuh | | | 100.000.000 | | 100.000.000 | |
| 2 | 5 | | Pembangunan/Rehab Rumah Keluarga Miskin | | | | | | | | - | |
| 2 | 5 | 1 | Pembangunan/Rehab Rumah Keluarga Miskin | Desa Gemantar | 6 unit | Desa Gemantar | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | |
| 2 | 6 | | Pembangunan Jembatan Desa | | | | | | | | - | |
| 2 | 6 | 1 | Pelebaran Jembatan Dusun Dukuh | Dukuh | | Dukuh | | | 16.000.000 | | 16.000.000 | |
| 2 | 6 | 2 | Perbaikan Jembatan Dusun Dukuh | Dukuh | | Dukuh | | | 25.000.000 | | 25.000.000 | |
| 2 | 7 | | Pembangunan Saluran Drainase | | | | | | | | - | |
| 2 | 7 | 1 | Drainase Jalan Dusun Gemantar RT 01 | Gemantar | | Gemantar | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | |
| 2 | 7 | 2 | Drainase Dusun Bakalan RT 02 | Bakalan | | Bakalan | | | 40.891.000 | | 40.891.000 | |
| 2 | 7 | 3 | Drainase Dusun Bakalan RT 01 | Bakalan | | Bakalan | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | |
| 2 | 7 | 4 | Drainase Jalan Dusun Gemantar RT 02 | Gemantar | | Gemantar | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | |
| 2 | 8 | | Pembangunan Talud | | | | | | | | - | |
| 2 | 8 | 1 | Talud Jalan Puter Distrik | Puter Distrik | | Desa Gemantar | | | 70.000.000 | | 70.000.000 | |
| 2 | 8 | 2 | Talud Jalan Dusun Kenangan RT 04 | Kenangan | | Kenangan | | | | 20.000.000 | 20.000.000 | |
| 2 | 8 | 3 | Talud Jalan Dusun Kenangan RT 04 | Kenangan | | Kenangan | | | 50.000.000 | | 50.000.000 | |
| 2 | 8 | 4 | Talud Jalan Dusun Ngaliyan RT 01 | Ngaliyan | 30 m | Ngaliyan | | | | 10.000.000 | 10.000.000 | |
| 2 | 8 | 5 | Talud Jalan Dusun Bakalan RT 03 (Lanjutan) | Bakalan | | Bakalan | | | 30.000.000 | | 30.000.000 | |
| 2 | 8 | 6 | Talud Jalan Dusun Bakalan RT 03 | Bakalan | | Bakalan | | | | 20.000.000 | 20.000.000 | |
| 2 | 9 | | Pembangunan Sarana Prasarana Fisik Kantor | | | | | | | | - | |
| 2 | 9 | 1 | Rabat halaman Kantor Desa | Kantor Desa | | Kantor Desa | | | 20.000.000 | | 20.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|---|---------------|------------|---------------|--|------------|--|--|------------|
| Misi | | | | | | | | | | | - |
| 3 | | | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | | | | | | | | - |
| 3 | 1 | | Pembinaan TP.PKK | | | | | | | | - |
| 3 | 1 | 1 | Belanja Barang dan Jasa | Desa Gemantar | 1 tahun | TP.PKK | | 5.000.000 | | | 5.000.000 |
| 3 | 2 | | Pembinaan PAUD dan TK | | | | | | | | - |
| 3 | 2 | 1 | Belanja Barang dan Jasa | Desa Gemantar | 2 kelompok | TK dan PAUD | | 1.000.000 | | | 1.000.000 |
| 3 | 3 | | Peningkatan Peran dan Fungsi LPM | | | | | | | | - |
| 3 | 3 | 1 | Belanja Barang dan Jasa | Desa Gemantar | 1 tahun | LPM | | 1.500.000 | | | 1.500.000 |
| 3 | 4 | | Peringatan Hari Besar Nasional | | | | | | | | - |
| 3 | 4 | 1 | Belanja Barang dan Jasa | Desa Gemantar | 1 kegiatan | Desa Gemantar | | 10.000.000 | | | 10.000.000 |
| 3 | 5 | | Pembinaan Linmas dan Siskamling | | | | | | | | - |
| 3 | 5 | 1 | Belanja Barang dan Jasa | Desa Gemantar | 1 kegiatan | Linmas | | 1.000.000 | | | 1.000.000 |
| 3 | 6 | | Pembinaan Karang Taruna | | | | | | | | - |
| 3 | 6 | 1 | Belanja Barang dan Jasa | Desa Gemantar | 1 tahun | Karang Taruna | | 1.000.000 | | | 1.000.000 |
| 3 | 7 | | Pengadaan Sarana dan prasarana Olah Raga (8 Club) | | | | | | | | - |
| 3 | 7 | 1 | Belanja Barang dan Jasa | Desa Gemantar | 8 kelompok | Club Olahraga | | 4.000.000 | | | 4.000.000 |
| 3 | 8 | | Fasilitasi Keagamaan | | | | | | | | - |
| 3 | 8 | 1 | Belanja Barang dan Jasa | TPQ | 8 kelompok | TPQ | | 4.000.000 | | | 4.000.000 |
| 3 | 9 | | Pengadaan dan Perlengkapan Peralatan PAUD | PAUD | 1 kegiatan | PAUD | | 6.000.000 | | | 6.000.000 |
| 3 | 9 | 1 | Belanja Modal | | | | | | | | - |
| Misi | | | | | | | | | | | - |
| 4 | | | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | | | | | | - |
| 4 | 1 | | Pemberdayaan Posyandu | | | | | | | | - |
| 4 | 1 | 1 | Belanja Barang dan Jasa | Desa Gemantar | 8 kelompok | Posyandu | | 6.000.000 | | | 6.000.000 |
| 4 | 2 | | Partisipasi Pembangunan Wilayah | | | | | | | | - |
| 4 | 2 | 1 | Penyusunan RKP Desa | Desa | 1 Kegiatan | Desa | | 895.000 | | | 895.000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|---|---------------|----------|---------------|--|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| | | | | Gemantar | | Gemantar | | | | | | | |
| 4 | 3 | | Forum Kesehatan Desa | | | | | | | | | | - |
| 4 | 3 | 1 | Peningkatan SDM Kader TRIBINA | Desa Gemantar | 40 Orang | Desa Gemantar | | 1.533.000 | | | | | 1.533.000 |
| 4 | 3 | 2 | Peningkatan SDM Sub PPKBD dan KKB PK | Desa Gemantar | 10 orang | Desa Gemantar | | 800.000 | | | | | 800.000 |
| 4 | 4 | | Pengadaan Sarana dan Prasarana PKD Sido Waras Desa Gemantar | | | | | | | | | | - |
| 4 | 4 | 1 | Belanja Modal | PKD | | Desa Gemantar | | 3.700.000 | | | | | 3.700.000 |
| | | | | | | | | | | | | | - |
| JUMLAH | | | | | | | | 114.705.000 | 523.554.975 | 20.631.000 | 77.2891.000 | 130.000.000 | 1.561.781.975 |

KEPALA DESA GEMANTAR

SUNARNO